

## MENGUNGKAP KOMPLEKSITAS MASALAH PADA KONSEP *SUBSTANCE OVER FORM*

**Agung Budi Sulistiyo**  
*agungbudisulistiyo@gmail.com*  
Universitas Jember

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to reveal the complexity problems of the concept of substance over form which is inherently substantial and fundamental. This problem is related to the ambiguity meaning of the concept, its opposition to other accounting concept and principles (such as historical cost, materiality and earnings management) and unwittingly efforts to mystify the substance over form concept. On the other hand, the concept is also stuck on the dichotomy and hyperreality way of thinking. The method of discussion is using critical analysis method and supported by literature review. The study showed that the fundamental weakness of the concept can be reviewed at the level of philosophical, theoretical and empirical understanding. At the practical level, different interpretations to the concept encourage dysfunctional behaviour which violates accounting code of ethics and standards of truth. The significance of this paper is expected to provide a positive and constructive contribution to the standard setters and financial accounting standards policy makers in Indonesia to review the concept of substance over form, both at conceptual and implementation.*

*Key words: Substance over form, conceptual conflict, biverbal, myth.*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap adanya kompleksitas permasalahan yang bersifat mendasar dan substansial yang melekat pada konsep *substance over form*. Permasalahan ini terkait dengan ambiguitas makna yang terkandung dalam konsep tersebut, pertentangannya dengan konsep dan prinsip akuntansi yang lain (seperti kos historis, materialitas, dan manajemen laba) serta tanpa disadari adanya upaya pemitosan terhadap konsep *substance over form*. Pada sisi yang lain, konsep ini juga terjebak pada cara berpikir dikotomi dan hiperrealitas. Metode pembahasan menggunakan analisis kritis dengan dukungan kajian literatur. Hasil telaah menunjukkan bahwa kelemahan mendasar konsep *substance over form* ini dapat ditinjau pada tingkat penalaran filosofis, teoretis, dan empiris. Pada tataran praksis, penafsiran yang berbeda terhadap konsep ini dapat mendorong perilaku akuntan yang menyimpang dari kode etik dan standar kebenaran. Signifikansi penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan yang positif dan konstruktif bagi para peneliti dan pengambil kebijakan standar akuntansi keuangan di Indonesia untuk mengkaji ulang konsep *substance over form* baik secara konseptual maupun pada tataran implementasinya.

Kata kunci: *Substance over form*, konflik konseptual, biverbal, mitos.

### PENDAHULUAN

Pada akhir Desember 2001, dunia bisnis dikejutkan oleh skandal keuangan yang melibatkan perusahaan raksasa energi di Amerika, yaitu *Enron Corp.* Perusahaan ini melakukan praktik manipulasi laporan keuangan (*window dressing*) dengan cara menggelembungkan pendapatannya se-

besar US\$ 600 juta dan menutupi utangnya senilai US\$ 1,2 milyar (Elwin, 2008). Efek kecurangan yang ditimbulkan begitu dahsyat, karena *Enron Corp.* mampu membukukan laba pada tahun 2000 sebesar US\$ 100 milyar (kurang lebih sama dengan total pendapatan kotor Indonesia pada tahun yang sama) dan mencatat kapitalisasi nilai

pasar saham berkisar US\$ 60 milyar (setaradengan dua kali lipat anggaran belanja Indonesia tahun 2000) (Mustika, 2008).

Kasus Enron Corp. di atas memang sudah lama terjadi, namun gaungnya masih dirasakan hingga saat ini. Paling tidak dalam diskusi tentang etika dan perilaku akuntan, ulah tidak terpuji dari para pe-tinggi Enron selalu menjadi bahan pembelajaran dan hikmah yang berharga. Ada isu praktis yang mencuat dalam kasus ini bahwa betapapun ketatnya standar ke amanan keuangan di suatu perusahaan atau negara, peran manusia sebagai faktor pelaksana suatu kebijakan tetaplah me megang peranan vital. Jika manusianya tidak bermoral dan beretika, maka standar yang dibangun seketat apapun juga dapat dilanggar.

Berangkat dari kasus Enron itu pula, Kongres Amerika Serikat melalui bagian hukum federalnya mengeluarkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley (*Sarbanes-Oxley Act of 2002*) sebagai reaksi atas skandal akuntansi perusahaan besar, termasuk diantaranya Enron Corp. Implikasinya jelas mengarah pada penguatan pengawasan akuntansi perusahaan. Hal ini juga mengindikasikan adanya isu terhadap perbaikan standar akuntansi dan keuangan di Amerika. Secara implisit, kasus Enron mengajarkan pada kita bahwa penanganan atau solusi atas masalah besar tersebut berkisar pada pembahasan atas dua isu besar, yakni isu standar berupa dikeluarkannya Undang-Undang *Sarbanes-Oxley* dan isu praktis, yaitu perlunya perbaikan etika dan moral para pelaku bisnis terutama profesi akuntan.

Fakta Enron mampu memberi ruang besar bagi para peneliti akuntansi untuk menggali lebih jauh beberapa isu konsepsual yang dapat dijadikan sebagai permasalahan penelitian. Dalam hal ini, Baker dan Hayes (2004), misalnya, melihat adanya problem *substance over form* pada transaksi keuangan yang dimanipulasi oleh Enron. Problem yang muncul berkaitan erat de-

ngan penafsiran atas implementasi konsep *substance over form* oleh manajemen Enron Corp. Konsep ini justru dipraktikkan terbalik menjadi *form over substance* untuk menutupi tindakan kecurangan (*fraud*) para manajemen Enron melalui laporan keuangan yang dibuatnya.

Kejadian sama juga terjadi pada perusahaan Cendant (*Cendant Corp.*) tahun 1998, mereka melakukan penipuan informasi keuangan kepada publik dengan cara mengakui pendapatan yang tidak pernah ada (fiktif) (Hayes dan Baker, 2004). Dalam kasus *Cendant Corp.* tersebut, praktik pengakuan transaksi fiktif dalam bentuk pencatatan akun pendapatan dapat mewakili unsur *form* (bentuk) sedangkan kejadian sesungguhnya yang tidak pernah ada, menunjukkan unsur *substance* (substansi). Dengan demikian, tindakan curang para manajemen *Cendant Corp.* memperlihatkan adanya praktik *form* yang lebih diutamakan dibandingkan *substance*-nya. Bahkan pernyataan Arthur Levitt, seorang *Chairman Securities and Exchange Commission* (SEC) Amerika Serikat, semakin memperkuat realita tersebut. Ia menyatakan bahwa adanya tekanan yang diberikan oleh pasar modal terhadap perusahaan publik (emiten) menyebabkan mereka lebih menekankan praktik *form over substance* (Hayes dan Baker, 2004).

Kasus Enron Corp., *Cendant Corp.*, dan pernyataan Arthur Levitt tersebut menegaskan pada kita, bahwa setiap tindakan akuntansi (*accounting action*) yang memanipulasi, merekayasa, dan melanggar kejujuran sebuah transaksi atau peristiwa akuntansi sehingga mendorong para pelakunya (*accounting's creator*) membuat bukti transaksi ataupun laporan keuangan palsu (fiktif) dapat dikategori sebagai pelanggaran atas konsep *substance over form*. Dengan perluasan definisi tersebut, kita dapat mengidentifikasi beberapa kasus praktik manipulasi laporan keuangan (akuntansi) di Indonesia yang semakin memperkuat fakta empiris adanya penyimpangan atas konsep *substance over form* tersebut.

Pada tahun 2001, PT Kimia Farma Tbk melakukan manipulasi laporan keuangan dengan cara menggelembungkan harga persediaan sehingga nilai penjualan dan persediaan menjadi lebih saji (*overstatement*). Hal ini berdampak serius, karena laba bersih yang disajikan per 31 Desember 2001 lebih besar Rp 32,7 milyar (Norbarani 2012, 4). Demikian halnya dengan kasus Bank Lippo, yang menyajikan laporan keuangan ganda, laporan keuangan yang disampaikan kepada pihak Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan kepada publik berbeda. Laporan keuangan Bank Lippo kepada publik tanggal 28 November 2002 melaporkan total aset perseroan Rp 24 trilyun dan laba bersih Rp 98 milyar. Namun, dalam laporan keuangan kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ) 27 Desember 2002, manajemen menyajikan total aset berkurang menjadi Rp 22,8 trilyun dengan rugi bersih Rp 1,3 trilyun (Herdiani, 2011). Kasus lebih baru melibatkan laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang memalsukan informasi kerugian perusahaan sebesar Rp 63 milyar sebagai keuntungan (laba) senilai Rp 6,9 milyar. Kasus PT Kimia Farma Tbk, Bank Lippo, dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sekali lagi, memperkuat adanya penggunaan laporan keuangan fiktif (*representasi form*) untuk menutupi fakta yang sesungguhnya (*mewakili substance*), sehingga jelas menunjukkan praktik *form over substance*. Dengan kata lain, kondisi ini menyiratkan adanya penyimpangan atas konsep *substance over form*.

Konsep *substance over form* yang menggambarkan sebuah situasi yang seharusnya (*das sollen*) ternyata dipraktikkan menyimpang menjadi *form over substance* (menjelaskan situasi yang terjadi (*das sein*)). Hal ini menunjukkan telah terjadi kondisi kesenjangan sehingga pada akhirnya menciptakan sebuah situasi yang problematis (Salim, 2006: 25). Situasi problematis tersebut memang dapat dianalisis melalui dua sudut pandang. *Pertama*, ditinjau dari sisi pragmatis. Adanya penyimpangan konsep *substance over form* dapat diduga terjadi kesalahan dalam aplikasi konsep tersebut

oleh para pelaku akuntansi. Para pelaku akuntansi dengan berbagai kepentingan yang dimilikinya (terutama niat yang negatif) menjadikan konsep *substance over form* tidak berjalan dengan baik di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadinya kesalahan (*error*) bukan pada konsep *substance over form*-nya melainkan pada orang (*person*) yang melakukan praktik akuntansinya.

Sudut pandang kedua, melihat pada sisi normatif, bahwasanya potensi terjadinya penyimpangan konsep *substance over form*, kemungkinan disebabkan konsep tersebut yang memang bermasalah, sehingga tidak mampu dijabarkan dan diterapkan dengan baik oleh para pelaku akuntansi. Adanya dugaan bermasalah tentu mengandung banyak kemungkinan jawaban baik pada aspek apa penyebabnya maupun solusi yang dapat ditawarkan untuk memperbaiki konsep *substance over form* tersebut.

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada sudut pandang normatif, yakni menduga bahwa terjadi anomali konsep *substance over form* sehingga praktik mengikuti cara berpikir *form over substance* adalah dikarenakan permasalahan yang melekat pada konsep substansi mengungguli bentuk ini. Problem mendasar tersebut dapat ditelusuri pada sifat konsep *substance over form* yang cenderung ambigu, terjebak pola pikir dikotomi dan hiperrealitas serta memiliki konflik konseptual dengan asumsi dasar maupun praktik akuntansi lainnya. Berikut penjelasannya secara berurutan.

#### AMBIGUITAS DALAM SUBSTANCE OVER FORM

Secara bahasa, konsep diartikan sebagai ide atau pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa yang konkret. Sejalan dengan makna tersebut, Suwardjono (2005: 19) menggambarkan konsep sebagai makna atau karakteristik yang berkaitan dengan kejadian, obyek, kondisi atau perilaku. Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan disiplin akuntansi maka ada keterkaitan

yang sangat erat antara pengembangan sebuah konsep akuntansi dengan fenomena dan realitas yang dihadapinya.

Meskipun demikian, tingkatan konsep tidaklah sekuat dan semapan sebuah teori. Beberapa ahli menyatakan bahwa teori dibentuk dari pernyataan konsep yang telah diuji secara ilmiah dan didukung oleh fakta. Dengan demikian, konsep baru sebatas proposisi yang disarikan dari fenomena yang terjadi. Merumuskan sebuah konsep dasar dalam disiplin ilmu tertentu bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu mampu merumuskannya dalam bentuk pernyataan yang jelas menunjukkan bahwa konsep yang dibangun memenuhi kriteria ilmiah.

Substansi mengungguli bentuk (*substance over form*) dikenal sebagai salah satu asumsi dasar dalam akuntansi keuangan. Pada laporan keuangan, substansi mencerminkan realitas dari transaksi atau peristiwa yang sesungguhnya terjadi sedangkan bentuk menunjukkan keadaannya ditinjau dari sudut hukum. Berkaitan dengan penyusunan standar, maka perekayasa dan penetapan konsep akuntansinya lebih menekankan pada makna atau substansi ekonomis suatu kejadian daripada makna yuridisnya (Suwardjono, 2005: 243).

Meyer (1976, 80) berupaya memperjelas konsep tersebut dengan menyodorkan sistem klasifikasi dua-dua (*a two-by-two classification system*) untuk menggambarkan dua dimensi dari konsep *substance over form*. Dimensi pertama adalah basis ekonomi dan dimensi yang kedua yaitu implementasi akuntansi. Basis ekonomi menjadi substansi dari sebuah transaksi sedangkan implementasi akuntansi yang berhubungan dengan proses pencatatan menjadi dasar dari sebuah bentuk (*form*). Dengan dua dimensi tersebut, standar akuntansi<sup>1</sup> yang ada telah memasukkan konsep *substance over form* sehingga diharapkan akan membantu akuntan dalam memecahkan masalah kontemporer dalam pelaporan keuangan.

<sup>1</sup>Yang dimaksud adalah standar akuntansi Amerika (US GAAP).

Meskipun demikian secara normatif, konsep *substance over form* yang tertulis dalam standar akuntansi di Amerika, Inggris maupun standar Internasional (AICPA, 1968) ternyata tidak dimaknai secara jelas dan seragam (Baker dan Hayes, 2004: 768). Bahkan dalam pandangan Rutherford (1985) konsep *substance over form* seringkali didefinisi secara ambigu (bermakna men- dua) dan membingungkan sebagaimana dalam pernyataannya berikut ini:

*..there is a shadowy nature to both the meaning and status of the concept and a confused and ambiguous nature in practice. Histories of the evolution of the concept of substance over form suggest that the precise words emerged in a confused and haphazard manner, reflecting the ebbs and flows of particular legislative initiatives and policy pronouncements (Rutherford, 1985; lihat juga Baker dan Hayes, 2004).*

Lebih jauh lagi diakui oleh Financial Accounting Standar Board (FASB) melalui *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 2* tentang ketidakjelasan (bersifat samar-samar) mereka dalam mendefinisi konsep tersebut. *Substance over form is, in any case, a rather vague idea that defies precise definition (FASB 1980, Appendix B, paragraph 160)*. Ketidaktegasan dalam memaknai konsep *substance over form* juga tersurat dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang notabene merupakan produk harmonisasi dari Standar Akuntansi Internasional<sup>2</sup> (*International Accounting Standards*). *Substance over form* diterjemahkan menjadi substansi mengungguli bentuk, diartikan “jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu

<sup>2</sup>Dalam IASC (1997a, paragraph 1.5) tertulis “*Substance over form is transactions and other events should be accounted for and presented in accordance with their substance and financial reality and not merely their legal form*”.

dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya” (Ikatan Akuntan Indonesia/IAI, 2002:paragraf 35)<sup>3</sup>. Kalimat “.. dan bukan hanya bentuk hukumnya”, justru mengandung interpretasi kesetaraan antara substansi dan bentuknya, yang tentu saja tidak dimaknai adanya keunggulan substansi di atas bentuknya.

Kondisi serupa juga terjadi pada disiplin ilmu *auditing* yang sangat erat kaitannya dengan praktik akuntansi. Dalam pengumpulan bukti audit kita mengenal istilah bukti (*evidence*) dan bahan bukti (*evidential matter*). Jika dihubungkan dengan konsep *substance over form*, maka *evidential matter* dapat dianggap sebagai substansinya sedangkan *evidence* sebagai bentuknya. Menurut telaah kritis oleh Sudibyo (2001) terhadap perilaku auditor dalam mengumpulkan bukti audit, ada kecenderungan para auditor terjebak ke dalam simbol dan formalitas legal suatu transaksi bisnis sehingga mengabaikan substansi ekonomisnya. Jika hal ini dibiarkan, maka akan mengurangi kualitas laporan keuangan di Indonesia sebagaimana ditegaskan oleh Sudibyo (2001, 1) sebagai berikut:

“Jika sebagai dampak reduksi dari standar *evidential matter* itu laporan keuangan menjadi kurang merefleksi substansi ekonomis perusahaan, dan laporan itu karena reduksi tersebut kemudian diaudit dengan cara yang substandar, maka tentunya integritas pelaporan keuangan di Indonesia menjadi ikut tereduksi secara serius pula”.

Pernyataan tersebut menyiratkan adanya kekhawatiran apabila fokus perhatian auditor semata-mata tertuju pada pe-

ngumpulan bukti audit yang legal guna menentukan opini kewajaran suatu laporan keuangan. Aspek legalitas lebih mengacu pada ukuran kuantitas dan dapat diverifikasi melalui persyaratan formal namun kurang memperhatikan kenyataan apakah memang suatu transaksi bisnis benar-benar telah terjadi. Oleh karena itu sangat mungkin pada saat mengumpulkan bukti auditnya, seorang auditor lebih mengedepankan bentuk di atas substansi ekonomisnya (*form over substance*). Kondisi ini tentu menyimpang dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan pedoman audit Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang lebih menekankan pada konsep *substance over form*.

#### **SUBSTANCE OVER FORM DALAM DILEMA DIKOTOMI**

Pendekatan *substance over form* sebenarnya berpotensi menimbulkan bias dalam menyampaikan informasi yang benar. Dalam pandangan Baker dan Hayes (2004: 769) situasi Enron ini dapat terjadi karena *United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP)* menempatkan *substance over form* sebagai bagian dari prinsip reliabilitas (*reliability*) dan penyajian yang wajar (*representational faithfulness*). Pada kenyataannya banyak transaksi Enron yang memenuhi kriteria reliabel dan sesuai dengan *US GAAP* menurut hasil audit Arthur Andersen. Namun demikian jika dihubungkan dengan makna *representational faithfulness* menurut FASB, maka informasi keuangan seharusnya menyajikan informasi tentang apa yang ingin disajikan (*represent what it is intended to represent*). Hal ini menyiratkan adanya keleluasaan bagi manajemen perusahaan untuk menampilkan informasi kepada para pemakai laporan keuangan sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Oleh karena itu, sangat terbuka adanya perbedaan keinginan mengenai masalah informasi keuangan antara manajemen Enron dan publik Amerika. Faktanya bahwa manajemen Enron merealisasi ke-

<sup>3</sup>Definisi yang sama juga terdapat dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK) mengenai substansi mengungguli bentuk (IAI, 200: paragraf 56).

inginannya untuk melakukan penggelapan keuangan melalui rekayasa penyajian informasi akuntansi. Tanpa disadari, dengan kejadian Enron tersebut, menyiratkan pula adanya penggunaan konsep *form over substance* dan bukannya *substance over form*, karena bukti transaksi yang legal (*form*) dipakai untuk menutupi transaksi yang tidak benar dan ilegal (*substance*). Hal ini mencerminkan bias kebenaran yang pertama dari konsep *substance over form*. Dengan kata lain dalam kasus tersebut ada sebuah kebohongan yang tertutupi.

Di sisi lain, muncul pula bias kebenaran yang kedua dari konsep *substance over form*. Sebagai contoh pada transaksi yang melibatkan barang konsinyasi. Aturan akuntansi menyatakan bahwa perpindahan barang konsinyasi dari *consignor* ke *consignee* tidak perlu dicatat, karena dianggap belum terjadi transaksi penjualan. Kalau dianalisis lebih lanjut, memang benar bahwa peristiwa konsinyasi itu tidak dicatat sebagai transaksi pendapatan/penjualan, tetapi perpindahan barang konsinyasi tersebut seharusnya tetap dicatat oleh akuntansi untuk menggambarkan terjadinya sebuah peristiwa konsinyasi (Warsono, 2011: 86). Kasus ini juga menunjukkan pada kita bahwa ada sebuah kebenaran yang tertutupi.

Dua kondisi tersebut sama-sama menggambarkan adanya ketimpangan realitas dan ketidakadilan yang mendorong perbuatan melanggar hukum dan etika kebenaran. Ada suatu kebohongan yang tertutupi ataupun suatu kebenaran yang tertutupi dari realitas yang sesungguhnya. Adanya ketimpangan realitas dan ketidakadilan boleh jadi dikarenakan cara berpikir dan tindakan kita yang cenderung menganggap satu hal lebih penting, lebih tinggi ataupun lebih baik dari yang lain, sehingga “yang lain” ini disingkirkan dan dimarjinalkan dari kehidupan. Pola pikir ini dikenal dengan gaya berpikir dikotomi.

Pola berpikir dikotomi juga masuk dalam ranah akuntansi. Pada dasarnya

akuntansi modern<sup>4</sup> banyak dipengaruhi pola pikir modern yang dikotomis dari konsep oposisi biner (Triyuwono 2006, 4). Lebih lanjut pola pikir ini memiliki perilaku saling meniadakan (*mutually exclusive*) dari dua hal yang berbeda, misalnya saja egoistik-altruistik, *private*-publik, kuantitatif-kualitatif, dan juga material-spiritual. Bahkan Hines (1992) menegaskan bahwa akuntansi modern memiliki bias gender maskulin. Sifat egoistik, *private*, kuantitatif, dan material dianggap mewakili gaya maskulin sedangkan sifat altruistik, publik, kualitatif, dan spiritual mencerminkan gaya feminin. Dengan berpikir dikotomi maka sifat maskulin diklaim lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih baik dari sifat feminin yang dinilai lebih lemah dan lebih rendah.

Triyuwono (2006, 4) melihat adanya masalah dalam bias gender maskulin dalam disiplin akuntansi ini. Dengan sifat egoistiknya, seorang manajer perusahaan akan berupaya mencapai laba perusahaan semaksimal mungkin tanpa memperhatikan kondisi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Mereka mungkin dirugikan baik material maupun non material akibat ulah perusahaan dalam mengeksplorasi sumber daya alam tanpa konservasi, sehingga menyumbang polutan dalam jumlah besar bahkan tanpa filterisasi lebih dulu. Kondisi ini menunjukkan dominasi maskulin (dengan sifat egoistik manajernya) yang sangat kuat atas sifat feminin (cerminan sifat peduli atas lingkungan dan masyarakat sekitar).

Demikian pula halnya ketika akuntansi menggunakan konsep *substance over form* dalam mencatat transaksi maka tersirat adanya kecenderungan berpikir dikotomis (Triyuwono 2006) dan sekaligus mengandung bias gender maskulin (Hines, 1992). Substansi dianggap lebih penting dan mengungguli bentuknya sehingga posisi *form* (bentuk) menjadi terpinggirkan dari

---

<sup>4</sup>Akuntansi modern merujuk pada model akuntansi saat ini yang dikembangkan dalam budaya kapitalistik.

realitas akuntansi. Substansi dianggap maskulin dan bentuk dianggap feminin. Dalam istilah lain posisi substansi dapat disebut pula sebagai *core datum*<sup>5</sup> dan bentuk menunjukkan *peripheral datum*<sup>6</sup>. Suatu keadaan yang menyiratkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam sebuah realitas akuntansi.

### BERPIKIR METAFORIS ATAU TERJEBAK PADA HIPERREALITAS?

Beberapa peneliti akuntansi menyatakan bahwa akuntansi mengandung aspek kebahasaan (Li, 1972; Belkaoui, 1980; Lee, 1982; Suwardjono, 2005; Riduwan dkk, 2009). Akuntansi dipandang sebagai sebuah bahasa yang mengandung pesan informasi mengenai keuangan maupun non keuangan untuk disampaikan kepada para pengguna yang berkepentingan (berperan sebagai penerima pesan/komunikator). Adapun kapasitas perusahaan dalam konteks tersebut adalah sebagai penyedia informasi akuntansi dan sekaligus penyampai pesan (komunikator).

Dalam kenyataannya, proses alih informasi dengan menggunakan media bahasa tidak selamanya berjalan mulus. Beberapa masalah dapat terjadi baik pada sisi pemberi informasi maupun yang menerimanya bahkan sangat mungkin terkait dengan simbolisasi dari objek yang menjadi pokok bahasan. Ketika menyampaikan bahasa sebagai simbol atau representasi dari sebuah realitas, komunikator cenderung meyakini bahwa akuntansi hanya ada seperti yang terlintas dalam pikiran si pemberi informasi saja (Macintosh, Shearer, Thornton dan Welker 2000, 13; Mattesich 2003, 443; Riduwan, 2009:4). Tidak menutup kemungkinan si penerima informasi mempersepsikan dengan makna yang berbeda

dengan si pemberi informasi (Lee, 1982; Riduwan, 2009: 4). Dalam kondisi yang lain masalah komunikasi yang muncul dapat diakibatkan oleh kompleksitas simbol sehingga sulit dipahami (Preston, Wright dan Young 1996, 121; Riduwan, 2009: 4) atau juga simbol sulit ditemukan dalam dunia nyata (Li 1972, 105; Riduwan, 2009: 4). Menarik untuk dikaji lebih lanjut ketika mendapati simbol bahasa ternyata sulit bahkan tidak mencerminkan realitas yang sesungguhnya. Menjadi hal yang wajar ketika simbol akuntansi tidak mampu menangkap realitas maka yang terjadi adalah upaya menggambarkan realitas tersebut dengan kiasan atau metafora.

Metafora secara umum dapat dimaknai sebagai bahasa *non-literal* atau figuratif yang mengungkap perbandingan antara dua hal secara implisit (Aisah 2010, 4). Ada dua jenis metafora yakni metafora kreatif dan metafora konvensional. Metafora kreatif digunakan oleh penulisnya untuk mengekspresikan gagasan dan pemikirannya sehingga pembaca lebih mudah memahami maksud dari tulisan tersebut. Dalam metafora kreatif ungkapan yang dimunculkan bersifat baru dan mencerminkan realitas yang ada. Adapun pada metafora konvensional sifat ungkapan tidak baru lagi karena sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis metafora konvensional ini sering disebut juga dengan metafora mati (Aisah 2010, 5). Pada kedua jenis metafora tersebut tampak adanya kesamaan arti dalam hal ungkapan yang ditulis, yaitu sama-sama mencerminkan realitas kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks akuntansi sulit untuk menggambarkan realitas ekonomi yang sesungguhnya sebagaimana ditegaskan oleh Hines (1988). Oleh karenanya beberapa peneliti cenderung menggunakan metafora atau kiasan untuk menafsirkan konsep *substance over form* (Hayes dan Baker, 2004; Hayes dan Baker, 1997). Metafora yang cukup menarik disampaikan oleh Hayes dan Baker (1997) untuk menjelaskan konsep *substance over form* melalui kisah Cinderella.

<sup>5</sup>Suatu *value* atau nilai yang dianggap pusat dalam disiplin ilmu (Mulawarman, 2010; 2011).

<sup>6</sup>Merupakan lawan dari *core datum* karena dianggap memiliki posisi yang ada di pinggir atau terpinggirkan dari yang pusat (Mulawarman, 2010; 2011).

Secara ringkas gambaran kisahnya sebagai berikut: Cinderella merupakan penjelmaan sebuah informasi akuntansi. Ibu tiri yang mengatur keluarga secara absolut digambarkan sebagai manajemen perusahaan. Orang-orang di istana termasuk pangeran dan kedua saudara tiri Cinderella merepresentasikan para pengguna informasi akuntansi (*users*). Ketika Cinderella (informasi akuntansi) akan pergi ke pesta dansa (mencerminkan media untuk menyajikan informasi transaksi kepada publik/user) maka lewat bantuan Ibu Peri (tidak jelas perannya karena bersifat magis maka digambarkan sebagai orang dalam perusahaan yang berhati baik dan berseberangan dengan ibu tiri cinderella) mengubah wujud Cinderella (informasi akuntansi) menjadi lebih cantik dan lebih baik dari wujud sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh ibu peri (orang dalam perusahaan yang baik) yang mengubah wujud Cinderella merupakan bentuk manipulasi informasi akuntansi walaupun di dalamnya mengandung tujuan yang baik. Namun pada akhirnya si pangeran (user utama) menginginkan kebenaran siapa sesungguhnya Cinderella tersebut (informasi akuntansi yang benar dan akurat). Untuk mencapai tujuan tersebut maka pangeran (user utama) menggunakan sepatu kaca (bukti transaksi) sebagai dasar untuk mencari tahu kebenaran informasi akuntansi dan melakukan investigasi independen (pengawal). Singkat cerita, si pengawal (investigator independen) berhasil menemukan bukti bahwa sepatu kaca (bukti transaksi) merupakan milik Cinderella (informasi akuntansi) sehingga terungkaplah wujud asli Cinderella atau kenyataan sesungguhnya (*substance*) sebuah informasi akuntansi dari suatu realita yang tampak (*form*). Dan akhirnya pangeran (user utama) berhasil menikahi (mendapatkan) Cinderella (informasi akuntansi) yang sesungguhnya, tanpa ada rekayasa atau manipulasi (ditafsirkan dan diringkas dari Hayes dan Baker 1997, 3-8).

Bagi beberapa orang, membaca kisah Cinderella yang dianalogikan dengan

praktik akuntansi tentu akan lebih mudah dipahami bahkan boleh jadi akan selalu diingat dibandingkan hanya sekedar menjelaskan konsep-konsep akuntansi apa adanya. Pemahaman yang lebih baik atas konsep *substance over form* ini akan mendorong sikap transparansi yang lebih tinggi dalam praktik akuntansi (Hayes dan Baker, 1997: 18).

Pada sudut pandang yang berbeda, penggunaan bahasa metafora untuk menggambarkan realitas akuntansi justru akan mengarah pada situasi hiperrealitas. Hiperrealitas merujuk pada kondisi posmodern di mana *simulacra* (tanda, citra, atau model) tidak berasosiasi dengan kenyataan atau terlepas dari realitas obyek material atau idealitas romantis (Suryaningrum 2011, 5). Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Baudrillard dengan menjelaskan secara lebih utuh dalam konsep *order of simulacra*. Tingkatan simulacra yang dikemukakan Baudrillard adalah sebagai berikut *pertama*, tanda merefleksikan realitas yang benar-benar nyata dan yang ada mendahului tanda (*profound reality*). Pada situasi ini, tanda merujuk pada realitas dengan penampakan yang nyata, dan tanda merepresentasikan realitas yang jujur dan transparan. *Kedua*, tanda menyembunyikan atau malah menyimpangkan sifat asli dari realitas atau yang mendahuluinya. Dalam era ini, tanda merujuk pada penampakan realitas yang terdistorsi, dalam arti tanda tidak lagi memiliki sifat seperti yang dimiliki realitas. *Ketiga*, tanda menyembunyikan ketidakhadiran realitas. Pada kondisi ini, tidak berbeda dengan permainan sulap, tanda bermain untuk mewujudkan realitas. Dan *terakhir*, relasi antara tanda dan realitas dipertukarkan atau dibalik di mana keberadaan tanda terjadi mendahului keberadaan realitas. Pada konteks ini, tanda tidak memiliki relasi apapun dengan realitas, bahkan realitasnya sendiri belum atau sama sekali tidak ada (hiperrealitas) (Suryaningrum 2011, 6).

Dalam konteks akuntansi keuangan kondisi hiperrealitas ini juga terjadi

(McGoun, 1997; Macintosh, 2003; Riduwan, 2009). Secara eksplisit Macintosh (2003) menegaskan banyaknya simbol akuntansi yang tidak memiliki rujukan yang jelas pada obyek atau peristiwa nyata, sehingga akuntansi tidak secara penuh menjalankan fungsinya sesuai logika representasi, pertanggungjawaban, atau penyajian informasi ekonomik secara transparan (Suryaningrum 2011, 8). Riduwan (2009) ketika menafsirkan laba dengan perspektif Derrida juga menghasilkan simpulan yang sama bahwa laba akuntansi tidak mencerminkan realitas akuntansi yang ada. Tentu menjadi sebuah pertanyaan apakah konsep *substance over form* memang telah terjebak pada perangkap hiperrealitas juga?

#### KONFLIK DENGAN *HISTORICAL COST* DAN *FAIR VALUE*

Kos historis dimaknai sebagai harga pertukaran pada saat terjadinya (Suwardjono, 2005: 278). Hal ini juga menunjukkan jumlah kas atau setaranya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset sampai siap digunakan (Ghozali dan Chariri, 2007: 171). Dengan definisi tersebut, *historical cost* dianggap satu-satunya konsep pengukuran yang memenuhi kriteria obyektif karena dihasilkan melalui transaksi yang independen antara kedua belah pihak dan sesuai dengan harga yang disepakati pada saat itu.

Dalam penilaian Suwardjono (2005: 278), kos historis memiliki keunggulan yaitu dapat diuji validitas hasil penilaiannya, karena diperoleh dari hasil kesepakatan antara dua pihak yang independen. Faktor validitas pengujian inilah yang menjadikan kos historis dapat diandalkan sebagai informasi (reliabel). Namun sebaliknya jika dipandang dari sisi relevansi informasi, maka kos historis menjadi tidak bermanfaat, hal ini disebabkan nilai aset yang berubah seiring dengan berjalannya waktu baik akibat perubahan daya beli atau perubahan harga (Suwardjono, 2005: 278).

Terlepas dari kekuatan dan kelemahan yang melekat pada konsep *historical cost*,

ada satu kasus yang menjelaskan keterkaitan antara konsep *historical cost* dan *substance over form*: Bahwa ketika sebuah perusahaan mencatat transaksi harga perolehan aset A yang dibeli 10 tahun yang lalu senilai Rp 50 juta, kemudian manajemen ingin menyusun laporan keuangan pada tahun ini, maka harga aset A yang dicantumkan dalam neraca perusahaan juga tetap menunjukkan nilai sebesar Rp 50 juta. Walaupun pada kenyataannya, sangat mungkin harga aset tersebut sudah berubah nilainya baik mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Pencantuman harga aset saat ini dengan menggunakan informasi transaksi masa lalu mengindikasikan *historical cost* lebih mengutamakan bentuk (*form*) berupa bukti transaksi yang dianggap lebih valid dan obyektif dibandingkan substansi (*substance*) dari nilai aset yang sesungguhnya. Semestinya jika konsisten dengan konsep *substance over form* maka penilaian aset menggunakan informasi harga yang relevan, sehingga unsur substansi terekam pada perubahan harga saat ini. Fakta tersebut memperlihatkan pada kita bahwa pada saat standar akuntansi masih mengakui *historical cost* sebagai penilaian aset yang obyektif, maka kita akan menemukan pengabaian terhadap konsep *substance over form*.

Seandainya dikatakan bahwa dengan diterbitkannya standar akuntansi Internasional yang baru yakni *International Financial Reporting Standard (IFRS)* yang menggunakan pendekatan nilai wajar (*fair value*) maka konflik konseptual dengan *substance over form* tentu tidak terjadi lagi. Sebagaimana dapat dilihat dalam IASB (2011: 17), harga wajar menunjukkan nilai harga yang sesuai dengan kondisi terkini pada tanggal pengukuran dan berbasis pasar. Kebenaran informasi keuangan yang sesuai dengan kondisi saat inilah yang menjadikan basis pengukuran *fair value* sejalan dengan konsep *substance over form*.

Namun pendapat ini juga tidak sepenuhnya tepat, mengutip pernyataan Warsono (2011: 177) tentang kritiknya atas

penerapan *fair value*, bahwasanya pengukuran berbasis nilai wajar ini memunculkan risiko terdapatnya penyajian yang tidak/kurang jujur dengan alasan, *pertama*, nilai wajar mengandung unsur subyektifitas dan *kedua*, nilai wajar berpeluang memunculkan perbedaan pendapat karena perbedaan cara pandang. Dua alasan ini sangat terkait dengan sifat manusia yang cenderung oportunistik dan *self interest*.

Oleh karena itu, baik *historical cost* maupun *fair value* sama-sama berpotensi untuk melanggar konsep *substance over form*. Jika *historical cost* mengabaikan informasi keuangan saat ini (*level output* laporan keuangan), maka sebaliknya *fair value* yang menitikberatkan pada *judgment* akuntannya, juga dapat menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan harga wajarnya (*level input* laporan keuangan) sehingga sama-sama berpotensi menyajikan informasi yang tidak benar. Dengan kata lain, ketidakbenaran informasi tentu melanggar aspek substansi (*substance*) dari sebuah transaksi akuntansi, terlepas apapun bentuknya (*form*).

Pada akhirnya, kalau kita mengacu pada kerangka konseptual (*conceptual framework*), dapat dilihat bahwa konsep *substance over form* menempati posisi yang lebih normatif dibandingkan basis pengukuran *historical cost* maupun *fair value*, sehingga sudah selayaknya konsep *substance over form* menjadi acuan untuk perumusan basis pengukuran transaksi yang lebih tepat. Tentu menjadi sebuah pertanyaan besar, ketika aspek yang kurang normatif (lebih pragmatis) dijadikan sebagai acuan dibandingkan aspek yang lebih normatif. *What's wrong?* Penelitian ini memiliki hasrat yang besar untuk menjawab pertanyaan tersebut.

## KONFLIK DENGAN KONSEP MATERIALITAS

Materialitas adalah besar kecilnya suatu penghilangan atau penyalahsajian informasi akuntansi yang menjadikan besar kemungkinan bahwa pertimbangan seorang bijaksana (*reasonable person*) yang meng-

andalkan diri pada informasi tersebut berubah atau terpengaruh oleh adanya aspek penghilangan, pengabaian atau penyalahsajian tersebut (Suwardjono, 2005: 178).

Lebih lanjut ditekankan bahwa sifat materialitas informasi keuangan sangat bergantung pada keputusan apakah informasi tersebut menarik perhatian *user* atau tidak (aspek relevansi) dan apakah jumlah rupiah informasi akuntansi yang disajikan nilainya besar atau kecil (aspek signifikansi). Hal ini berarti suatu informasi akuntansi dianggap tidak material, jika kualitas informasinya dianggap tidak/kurang menarik perhatian *user* dan kuantitas rupiahnya dinilai terlalu kecil (tidak signifikan). Demikian juga sebaliknya, dianggap material sebuah informasi akuntansi, jika informasinya menarik dan berkualitas serta nilai rupiahnya juga dianggap besar.

Yang patut menjadi perhatian dari pembatasan sifat materialitas tersebut adalah ukuran yang dipakai untuk menilai besar kecilnya nilai materialitas informasi akuntansi. Ukuran yang digunakan adalah materialitas kuantitatif (Suwardjono, 2005: 178). Misalnya dengan menetapkan persentase tertentu dari keseluruhan nilai akun atau sub akun tertentu dari unsur laporan keuangan. Demikian pula dengan unsur subyektifitas yang melekat pada penentuan ukuran materialitasnya, hal ini disebabkan karena lebih mendasarkan pada pertimbangan pribadi (*judgment*) akuntan. Sebagaimana pernyataan FASB dalam SFAC No. 2, paragraf 131:

*.. whenever the Board or any authoritative body imposes materiality rules, it is substituting generalized collective judgments for specific individual judgments, and there is no reason to suppose that the collective judgments are always superior... Quantitative materiality guidelines generally specify minimal only. They, therefore, leave room for individual judgment in at least one direction.*

Jika kita telaah lebih dalam, sebenarnya konsep materialitas tidak berpijak pada penyajian informasi yang jujur dan lengkap (*honest and complete information*), karena fokusnya hanya pada bagaimana menyajikan informasi akuntansi yang menarik dan berguna bagi para pengambil keputusan. Ukuran informasi yang menarik dan berguna tentu saja dibatasi oleh materialitas kuantitatif.

Tidak disajikannya informasi akuntansi yang tidak memenuhi kualifikasi material, menjadikan konsep materialitas melanggar asumsi *substance over form*. Sebuah informasi akuntansi walaupun nilai rupiahnya kecil bukan berarti diabaikan begitu saja, karena aspek substansi mendorong kejujuran dalam menangkap, mencatat realita akuntansi, dan menyajikan informasinya. Ketika akuntan berpedoman pada ukuran materialitas, sama artinya ia berlindung dibalik "*form*" material dan menegaskan nilai kebenaran sebuah peristiwa akuntansi (*substance*). Kondisi ini sekali lagi memperlihatkan pada kita, adanya konflik konseptual antara *substance over form* dan materialitas.

Pengabaian konsep *substance over form* dalam realitas akuntansinya, nampak semakin nyata ketika para auditor juga menggunakan konsep materialitas ini dalam menyajikan laporan auditnya. Pada paragraf pendapat sebuah laporan audit *unqualified opinion* tertulis pernyataan:

.. menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan X tanggal 31 Desember 2010 dan 2011, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kata material pada paragraf pendapat tersebut merujuk pada konsep yang sama dengan materialitas akuntansi (laporan keuangan). Oleh karena itu, opini laporan

audit sebatas menyatakan kewajaran penyajian laporan keuangan, dan bukan kebenaran informasi laporan keuangan. Adapun istilah kewajaran bermakna terdapat toleransi yang disepakati oleh auditor atas angka-angka laporan keuangan yang dianggap tidak material. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa ada pengabaian konsep *substance over form* dan lebih mengutamakan konsep materialitas di dalam memandang realita akuntansi. Fakta empiris ini, sebagaimana halnya dengan pembahasan sebelumnya mengenai basis pengukuran *historical cost* dan *fair value*, semakin mempertegas adanya penyimpangan konsep *substance over form* dalam praktik akuntansi.

#### ***SUBSTANCE OVER FORM, RELIABILITY LOST?***

Dalam kajian akuntansi keuangan, sebuah informasi akuntansi dinyatakan berguna dalam pengambilan keputusan, apabila memenuhi dua unsur utama yaitu relevansi (*relevance*) dan reliabilitas (*reliability*) (Johnson, 2005). Namun sayangnya, kedua unsur tersebut bersifat *trade-off*, artinya jika salah satu unsur ditingkatkan maka unsur yang lainnya menjadi berkurang kualitasnya. Dengan kenyataan tersebut, informasi keuangan tidak akan pernah mampu memberi informasi yang berguna sepanjang relevansi dan reliabilitas menjadi dua unsur yang saling meniadakan (*mutually exclusive*).

*Substance over form* secara konseptual memberi ruang yang luas bagi terciptanya unsur relevansi informasi, walaupun terlihat ada kecenderungan penegasan faktor reliabilitasnya. Hal ini dapat dipahami dengan menempatkan relevansi sebagai metafora *substance* dan reliabilitas mewakili unsur *form*. Peristiwa akuntansi (*event*) yang sesungguhnya terjadi (*substance*) tentu memberi informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan (*relevance*) sedangkan bukti transaksi (*form*) menjadi dasar yang valid (*reliability*) untuk menyusun informasi laporan keuangan. Ketika *substance* lebih unggul dibandingkan *form-*

nya, tentu demikian pula halnya dengan unsur relevansi yang lebih penting dibandingkan dengan reliabilitas sebuah informasi keuangan.

Kontradiksi di atas memberi sebuah stimulus untuk mempertanyakan kembali konflik konseptual yang terjadi antara *substance over form* dengan aspek relevansi dan reliabilitas informasi. Mengapa ini penting? Karena hal tersebut bertolak belakang dengan pernyataan FASB (1992) yang menyatakan bahwa kebergunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan akan hilang, apabila salah satu dari relevansi atau reliabilitas diabaikan. Dengan demikian, apakah *substance over form* mendorong informasi akuntansi kehilangan reliabilitasnya (*reliability lost*).

Jika pada tiga justifikasi awal menggambarkan pertentangan dengan konsep *substance over form* yang lebih bersifat konseptual, maka pada pembahasan berikutnya akan melihat dari kaca mata praktis, yakni bagaimana konflik yang timbul berkaitan dengan praktik manajemen laba.

### KONFLIK DENGAN PRAKTEK MANAJEMEN LABA

Pro dan kontra seputar manajemen laba (*earnings management*) masih berlangsung hingga saat ini. Ada dua pandangan ekstrim mengenai boleh tidaknya praktik manajemen laba dilakukan. Pandangan pertama meyakini bahwa manajemen laba bukanlah tindakan yang tidak etis, karena melakukan manipulasi laba dapat dibenarkan sepanjang mengikuti prinsip akuntansi yang berterima umum (Schroeder dan Clark, 1998: 248; Djakman, 2003: 145). Dalam praktik manajemen laba, seorang manajer dapat melakukan dengan memanfaatkan fleksibilitas yang ada pada standar akuntansi. Keleluasaan yang diberikan dalam standar akuntansi, mendorong seorang manajer dapat memainkan kebijakan akuntansi demi memenuhi kepentingan pribadi dan perusahaannya.

Pandangan kedua, tentu saja bertolak belakang dengan yang pertama, mereka meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya selalu memiliki sifat mementingkan dirinya sendiri (*self interest*). Sifat inilah yang seringkali bertentangan dengan kepentingan perusahaan ataupun publik, sehingga selalu ada potensi bahwa praktik manajemen laba yang dilakukan cenderung menyembunyikan realita perusahaan yang sebenarnya (Schipper, 1989: 92; Healy dan Wahlen, 1999: 368). Bahkan dinyatakan oleh Riduwan (2010: 18) bahwa praktik manajemen laba merupakan perilaku koruptif yang termotivasi oleh pikiran-pikiran yang terkorupsi. Dengan demikian, upaya menyembunyikan (manipulasi) laba sesungguhnya (*true earnings*), mengindikasikan tindakan koruptif yang melanggar etika dan kepentingan publik.

Kajian ini mengambil sudut pandang yang kedua, yaitu menilai praktik manajemen laba sebagai tindakan yang tidak dibenarkan, karena berinisiatif menyajikan informasi keuangan yang menyesatkan (*misleading information*) kepada para pengguna laporan keuangan. Walaupun tindakan ini dilakukan atas nama standar akuntansi yang memperbolehkan dan memberi peluang untuk terjadinya praktik tersebut.

Kalau dicermati lebih mendalam, kita dapat mengambil benang merah antara konsep *substance over form* dan praktik manajemen laba. Standar akuntansi yang dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk dalam menyajikan informasi keuangan, akan dibenarkan sepanjang mampu memberi kontribusi yang berguna dan bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Indikator kebergunaan dan kebermanfaatannya tentu tidak dapat dipisahkan dari aspek penyajian yang jujur (*representational faithfulness*) dan memenuhi asumsi kebenaran reflektif (*reflective truth*).

Ketika manajemen perusahaan melakukan rekayasa laba dengan beberapa cara yang umum digunakan seperti pemilihan metode akuntansi, *income smoothing* atau yang paling populer adalah *discretionary*

*accrual*, maka aspek kejujuran informasi pun menjadi tergadaikan. Informasi yang berguna bagi para pemilik saham (*stockholder*) diartisempitkan sebagai informasi yang menguntungkan. Mungkin dalam pandangan kreator manajemen laba, sesuatu yang jujur belum tentu membawa dampak yang menguntungkan bahkan bisa-bisa merugikan. Jadi mereka mencari alibi (alasan berlandung) di balik standar akuntansi sebagai sebuah bentuk (*form*) aturan yang dilegalkan oleh *standard setter*, namun di sisi yang lain mereka menafikan kebenaran dan kejujuran informasi akuntansinya (bukankah *substance* yang tergadaikan?).

Aspek kebenaran reflektif dalam pandangan Denisia (2007: 2303) menggambarkan sebuah realita yang nampak dalam cermin (*which reflects reality just like in a mirror*). Artinya, ada hubungan yang sangat erat antara obyek peristiwa dan cara penyajiannya, sebagaimana ia tegaskan dalam pernyataan berikut:

*The reflective truth reflects the relationship between the object and its representation. The observation and reflection of the objects has to meet certain standards of a true image. To fulfill this, the documents used for incoming information have to contain real and correct data, and the person preparing these documents has to be trustworthy* (Denisia, 2007: 2303)

Obyek peristiwa akuntansinya tentu menggambarkan data yang riil dan benar, yang mewakili unsur substansi dari sebuah kejadian, sedangkan dokumen yang digunakan untuk mencatat data dan mengolah menjadi informasi, tentu saja menggambarkan *form*-nya. Sebagaimana sebuah cermin yang mampu merefleksi obyek yang ada dihadapannya, begitu pula semestinya sebuah *form* yang mampu merefleksi *substance* dari suatu peristiwa akuntansi. Bagaimana dengan praktik manajemen laba? Boleh jadi itulah wujud dari sebuah cermin yang “retak”.

Pemaparan ketiga justifikasi tersebut sebelumnya, dilakukan dalam rangka memperkokoh argumen tasi adanya konflik konsep *substance over form* dengan konsep dasar maupun praktik akuntansi yang lain. Pemikiran ini bukan berarti serta merta menuduh bahwa konsep *historical cost* dan *fair value*, materialitas serta praktik manajemen laba yang salah sedangkan *substance over form* yang paling benar ataupun juga sebaliknya. Namun, pendapat ini sebagai pijakan awal untuk mempertanyakan ulang tentang eksistensi dan kontinuitas sebuah konsep *substance over form* sebagai salah satu pilar penting dalam memperkuat bangunan akuntansi.

Jika sebuah konsep dianggap mapan, pasti benar bahkan tabu untuk dipertanyakan, maka dikhawatirkan konsep tersebut akan dimitoskan oleh para pemujanya. Tindakan memitoskan ini dapat pula disebabkan oleh kerancuan dalam memahami arti sebenarnya dari sebuah konsep. Untuk memperjelas dugaan tersebut, pada argumentasi selanjutnya akan dipaparkan suatu teori besar dalam ranah *capital market research in accounting* yang cenderung dimitoskan oleh para pengikutnya. Teori ini memang tidak ada hubungannya dengan konsep *substance over form*, namun demikian dalam konteks berpikir ilmiah, sebuah analogi dapat digunakan sepanjang relevan dan mampu memperjelas topik utama yang sedang dibicarakan. Untuk itulah, pada pembahasan selanjutnya berupaya untuk memperjelas dan memperkuat dugaan terjadinya makna biverbal dan pemitosan dalam konsep *substance over form*.

#### **ARGUMENTASI “JERUK KOK MINUM JERUK?”**

Dalam ilmu bahasa dikenal istilah biverbal yaitu sinonim atau padanan kata.

Misalnya binatang-fauna, tanaman-flora, bohong-dusta, baju-pakaian, dan lain sebagainya. Beberapa contoh tersebut menunjukkan adanya kesamaan pemahaman dan makna sehingga kurang tepat jika dua kata yang berpadanan itu diletakkan secara bersamaan dalam satu kalimat. Hal ini selain mengakibatkan pemborosan kata (*redundant*) dalam kalimat juga mendorong pengaburan makna yang sebenarnya.

Termasuk dalam hal ini adalah konsep *substance over form* yang terjebak dalam situasi biverbal. Mari kita perhatikan kembali dua pernyataan definisi berikut mengenai *substance over form*:

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya” (IAI, 2002: paragraf 35). Dalam IASC (1997a, paragraph 1.5) tertulis *substance over form is transactions and other events should be accounted for and presented in accordance with their substance and financial reality and not merely their legal form.*

Definisi yang disampaikan baik oleh IAI maupun IASC tersebut menimbulkan kerancuan dalam berpikir karena penjelasan tentang makna *substance* dan *form* juga menggunakan istilah yang sama persis dengan dirinya. Tentu hal yang sulit bagi logika kita untuk menangkap makna sesungguhnya dari konsep *substance over form* dengan pola pikir biverbal tersebut. Kondisi ini identik dengan jargon dalam dunia periklanan yaitu “jeruk kok minum jeruk”. Dampak biverbal ini terhadap konsep *substance over form* mendorong perbedaan tafsir antar akuntan. Ambiguitas penafsiran ini mengakibatkan praktik yang berjalan juga menghasilkan ambiguitas kebenaran. Ketika perusahaan melakukan “*creative accounting*” dengan alasan demi memenuhi

kepentingan mayoritas pemilik modal maka segala upaya menjadi “benar” dan “sah” untuk dilakukan. Hukum kebenaran akan selalu berpihak kepada pemilik modal walaupun bertentangan dengan kepentingan publik. Penafsiran atas kalimat biverbal tersebut jika dibiarkan dan dianggap pasti benar maka akan menggiring para akuntan dan pengguna informasi akuntansi ke dalam perangkap mitos yang berkepanjangan. Sebuah situasi yang menungkgung cara berpikir dan bertindak seseorang sehingga tidak dapat membedakan praktik akuntansi yang benar dan salah.

### **SUBSTANCE OVER FORM DALAM PERANGKAP MITOS**

Gaffikin (2007: 3) mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Eugene Fama, pencetus hipotesis pasar efisien (*efficient market hypothesis/EMH*) bahwa:

*In 2004 The Wall Street Journal reported that even the “father of EMH”, Eugene Fama, at a conference to honour him held at The University of Chicago, conceded that markets may not be efficient and there may be “poorly informed investors” who do not act rationally.*

Pengakuan Fama ini tentunya sejalan dengan sejumlah hasil riset empiris yang dilakukan selama lebih dari 40 tahun yang ternyata gagal membuktikan kebenaran hipotesis tersebut (Gaffikin, 2007: 2). Namun demikian, masih banyak peneliti akuntansi yang ingin mempercayai keberadaan efisiensi pasar dan tetap melanjutkan melakukan penelitian untuk menguji tingkat efisiensinya. Tepatlah apa yang disampaikan oleh Kuhn (1962: 170), bahwa para peneliti akan terus mempercayai sebuah paradigma sebagai bentuk keyakinan (*faith*) walaupun banyak bukti (fakta) yang bertentangan dengannya. Keyakinan yang terus dipertahankan tanpa adanya justifikasi ilmiah yang kuat tentu akan mengarah pada sesuatu yang dimitoskan.

Mitos dalam disiplin akuntansi juga terjadi ketika kita melihat produk laporan keuangan sebagai dokumen yang netral dan obyektif bagi semua pihak. Bahwa laporan keuangan dianggap sebagai produk yang terukur, sistematis, dan bebas dari nilai maupun subyektifitas penyusunnya. Namun demikian, hal ini dibantah dengan adanya pendapat bahwa kandungan informasi akuntansi merupakan representasi dari konteks sosial politik tertentu yang mengandung makna-makna tersembunyi (Macintosh, 2005; Cooper dan Sherer, 1984). Oleh karena itu, dalam kacamata *political economy of accounting (PEA)*, penyajian informasi akuntansi memiliki muatan politik yang dapat menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan pihak yang lain.

Menegaskan apa yang dinyatakan Kuhn (1962) dan melihat fenomena empiris sebelumnya, penelitian ini mensinyalir adanya perlakuan yang sama terhadap konsep *substance over form*. Beberapa riset empiris memang sebatas membuktikan adanya penyimpangan *substance over form* yang dipraktikkan terbalik menjadi *form over substance* atau pula praktik manajemen laba yang menyalahi logika kebenaran substansi peristiwa akuntansi. Riset-riset tersebut masih meyakini kebenaran konsep *substance over form*, seperti halnya Hayes dan Baker (1997) ataupun Baker dan Hayes (2004), tanpa berupaya untuk mempertanyakan ulang validitas dari konsep itu.

Kajian ini berpikir sebaliknya, berlandaskan pada beberapa anomali yang terjadi pada konsep *substance over form*, baik pada level konflik konseptual maupun fakta empiris tunggal (yakni manajemen laba), maka dirasa cukup memadai untuk meneliti lebih lanjut dan berupaya mendobrak mitos konsep *substance over form* yang dianggap ideal. Sebuah upaya yang sejalan dengan pemikiran bahwa produk akuntansi (termasuk konsep *substance over form*) merupakan bagian dari realitas sosial yang tidak kebal dari kritik dan potensi kesalahan konsep.

## REKAPITULASI BUTIR-BUTIR KONSEPSUAL

Sarantakos (1993:41) menjelaskan bahwa salah satu poin penting dari prinsip dasar riset kuantitatif adalah penolakan terhadap penalaran filosofis (*philosophical reasoning*) di dalam merumuskan ataupun menjawab permasalahan penelitian. Penolakan ini dilakukan karena penalaran filosofis dianggap pola berpikir yang bersifat khayalan (*illusion*) dan menyesatkan/tidak masuk akal (*sophistry*) sehingga tidak memiliki dampak empiris (*empirical relevance*). Hal ini wajar saja, sebab akar filosofis dari riset kuantitatif adalah filosofi positivis/neopositivis (Sarantakos, 1993: 40).

Sebaliknya, kajian ini menggunakan cara berpikir filosofis sebagai upaya pembuktian bahwa konsep *substance over form* memang bermasalah. Meskipun demikian, tulisan ini mampu menyajikan dengan ilmiah bahwa bermula dari penalaran secara filosofis, dapat diturunkan beberapa masalah lain yang bersifat teoritis bahkan empiris sekalipun. Secara ringkas tabel 1 berikut menggambarkan hubungan antara konsep *substance over form* dan tiga model penalaran yakni filosofis, teoritis, dan empiris. Dalam kajian ini, disajikan beberapa argumentasi melalui penalaran teoritis yaitu adanya konflik konseptual dengan *historical cost/fair value*, konsep materialitas, dan relevansi-reliabilitas. Adapun dari sudut pandang empiris, ditemukan fakta yang berhubungan dengan praktik manajemen laba dan perangkap mitos.

## SIMPULAN

Patut disadari bahwasanya kemunculan sebuah konsep dalam disiplin ilmu tertentu merupakan konsekuensi pasti dari pembacaan manusia terhadap realitas keilmuan yang dihadapinya termasuk disiplin akuntansi. Dengan keterbatasan fitrah yang melekat pada dirinya maka akuntan berusaha melakukan penyederhanaan maupun abstraksi terhadap fenomena dan fakta yang terjadi supaya proses kehidupan dan keilmuan dapat berjalan dengan baik.

Namun demikian, seringkali konsep yang dibuat tersebut berseberangan dengan konsep lain yang sudah ada. Hal ini dikarenakan realitas keilmuan cenderung beraneka ragam sedangkan konsep yang dihasilkan mungkin berangkat dari satu sudut pandang sehingga kurang mengakomodir aspek-aspek lain yang terkait dengan dirinya. Oleh karena itu, tidak mustahil terjadi benturan antar konsep yang mengarah pada konflik konseptual, tak terkecuali dalam hal ini adalah konsep *substance over form*.

Pada sisi yang lain, definisi *substance over form* juga meninggalkan ambiguitas makna dan penafsiran sehingga mendorong praktek akuntansi yang menyimpang bahkan menjadi modus untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Ketika kondisi tersebut dibiarkan dan dianggap “baik-baik saja” maka para akuntan tanpa disadari terjebak dalam perangkap mitos. Jika sebuah konsep sudah dimitoskan maka ia akan menjadikan dirinya sebagai hukum Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat.

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Butir-Butir Konflik Konseptual**

Masalah Utama	Penalaran Filosofis	Penalaran Teoritis	Penalaran Empiris
<i>Substance Over Form</i>	1. Pola Berpikir Dikotomi	1. Konsep <i>historical cost/fair value</i>	1. Praktek Manajemen Laba
	2. Hiperrealitas	2. Konsep Materialitas	2. Makna Biverbal dan Perangkap Mitos
		3. Konsep Relevansi dan Reliabilitas	

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, S. 2010. *Metafora dalam Literatur*. <http://www.lontar.ui.ac.id>. Diunduh tanggal 10 Oktober 2011.
- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 1968. *Audit and Accounting Guide*. New York.
- Baker, C. R. dan R. S. Hayes. 2004. Reflecting Form Over Substance: The Case of Enron Corp. *Critical Perspectives on Accounting*. 15: 767-785.
- Belkaoui, A. R. 1980. The Interprofessional Linguistic Communication of Accounting Concepts: An Experiment in Sociolinguistic. *Journal of Accounting Research* 18(2): 362-374.
- Cooper, D. J. dan M. J. Sherer. 1984. The Value of Corporate Accounting Reports: Arguments For A Political Economy of Accounting. *Accounting, Organizations and Society*. 9: 207-232.
- Denisia, L. 2007. The Prevalence of Substance Over Form As An Attribute of The Credibility of Accounting Information. *Fascicle of Management and Technological Engineering*. VI(XVI).
- Djakman, C. D. 2003. Manajemen Laba dan Pengaruh Kebijakan Multi Papan Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya: 141-162.
- Elwin, B. 2008. *Kasus Enron*. <http://beniakt.blogspot.com>. Diunduh tanggal 25 Juni 2012.
- Financial Accounting Standard Board (FASB). 1980. *Statements of Financial Accounting Concepts*. Irwin.
- Gaffikin, M. 2007. Accounting Research and Theory: The Age of Neo-Empiricism. *Australasian Accounting Business and Finance Journal*, 1 (1).
- Ghozali, I. dan A. Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Edisi 3. BP Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hayes, R. S. dan C. R. Baker. 1997. *The Concept of Substance Over Form: A Discussion Based on the Cinderella Story*.

- Working Paper. School of Business and Economics California State University.
- \_\_\_\_\_. 2004. Using A Folk Story To Generate Discussion About Substance Over Form. *Accounting Education*. 13(2): 267-284.
- Healy, P. dan J. M. Wahlen. 1999. A Review of The Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting. *Accounting Horizons*. 13: 365-383.
- Herdiani, A. 2011. *Skandal Laporan Keuangan Bank Lippo*. <http://anindyaherdiani.blogspot.com>. Diunduh tanggal 25 Juni 2012.
- Hines, R. D. 1988. Financial Accounting: In Communicating Reality, We Construct Reality. *Accounting, Organizations and Society* 13(3): 251-261.
- \_\_\_\_\_. 1992. Accounting Filling The Negative Space. *Accounting, Organization and Society*. 17(3/4): 313-41.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Internasional Accounting Standard Board. 2011. *Fair Value Measurement*. <http://ifrs.org./IASB-Projects>. Diunduh tanggal 25 Juni 2012.
- International Accounting Standard Committee. 1997. *Exposure Draft*. International Accounting Standard Committee. London.
- Johnson, L T. 2005. Relevance and Reliability. *The FASB Report*. Feb 28.
- Kuhn, T. S. 1962. *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago Press. Chicago.
- Lee, T. A. 1982. Chambers and Accounting Communication. *Abacus* 18(2): 152-165.
- Li, D. H. 1972. The Semantic Aspect of Communication Theory and Accountability. *Journal of Accounting Research*. 10(2): 102-107.
- Macintosh, N.B. 2003. From Rationality to Hyperreality: Paradigm Poker. *International Review of Financial Analysis*. 12: 453-456. <http://www.sciencedirect.com>. Diunduh tanggal 28 Desember 2011.
- Macintosh, N. 2005. *Accounting, Accountants and Accountability: Poststructuralist Positions*. Routledge. New York.
- Macintosh, N. B., T. Shearer, D. B. Thornton, dan M. Welker. 2000. Accounting as Simulacrum and Hyperreality: Perspective on Income and Capital. *Accounting, Organizations, and Society*, 25: 15-30.
- Mattessich, R. 2003. Accounting Representation and The Onion Model of Reality: a Comparison with Baudrillard's Order of Simulacra and His Hyperreality. *Accounting, Organization and Society* (28): 443-470.
- McGoun, E. G. 1997. Hyppereal Finance. *Critical Perspective on Accounting* 8: 601-632.
- Meyer, P. E. 1976. A Framework for Understanding "Substance Over Form" In Accounting. *The Accounting Review*. January.
- Mustika, I. 2008. *Skandal Enron dan Arthur Andersen*. <http://iramustika.wordpress.com>. Diunduh tanggal 25 Juni 2012.
- Norbarani, L. 2012. *Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan dengan Analisis Fraud Triangle yang Diadopsi dalam SAS No. 99*. <http://eprints.undip.ac.id>. Diunduh tanggal 25 Juni 2012.
- Preston, A. M., C. Wright dan J. J. Young. 1996. Imag[in]ing Annual Reports. *Accounting, Organization and Society*. 21(1): 113-137.
- Riduwan, A. 2010. Etika dan Perilaku Koruptif dalam Praktik Manajemen Laba; Studi Hermeneutika. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. 14(2).
- Riduwan, A., I. Triyuwono, G. Irianto, dan U. Ludigdo, 2009. Semiotika Laba Akuntansi: Studi Kritis - Posmodernis Derridean. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XII*, Samarinda.
- Rutherford, B. A. 1985. The True and Fair View Doctrine: A Search for Explanation. *Journal of Business Finance and Accounting*. 12 (4): 483.

- Salim, A. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Penerbit Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Sarantakos, S. 1993. *Social Research*. Macmillan Education Australia PTY LTD.
- Schipper, K. 1989. Commentarry on Earnings Management. *Accounting Horizons*. 3: 91-102.
- Schroeder, R. G. dan M. V. Clark. 1998. *Accounting Theory: Text and Reading*. John Wiley & Sons. New York.
- Sudibyo, B. 2001. *Bambang Sudibyo Dikukuhkan Guru Besar*. Gatra.Com.htm. Diunduh tanggal 7 Maret 2012.
- Suryaningrum, D. H. 2011. *Beauty and The Beast: Hiperealitas dan Realitas Akuntansi-Kajian Posmodernisme Baudrillarian Atas Goodwill*. <http://www.scribd.com/doc/76702609>. Diunduh tanggal 31 Desember 2011.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi kedua. BPFE. Yogyakarta.
- Triuwono, I. 2006. *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*. Edisi 1. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Warsono, S. 2011. *Adopsi Standar Akuntansi IFRS Fakta, Dilema dan Matematika*. AB Publisher. Yogyakarta.